**GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**Metodologi Assesment GCG**

****

1. **Corporate Governance Perception Index (IICG)**

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah pemeringkatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep Corporate Governance (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan patok banding (*benchmarking*).

CGPI yang dilaksanakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA merupakan program tahunan sejak 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang etikal dan bermartabat. Sejak tahun 2001 hingga 2012 CGPI telah diikuti oleh perusahaan publik (emiten), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Swasta (BUMS).



Logo IICG

Kepesertaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh stakeholders dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG. CGPI mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya.

Program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan CG melalui CGPI Awards dan penobatan sebagai Perusahaan Terpercaya. Penghargaan CGPI Awards dan hasilnya dipaparkan di Majalah SWA dalam Sajian Utama.

Manfaat Mengikuti CGPI

IICG melalui program CGPI membantu perusahaan meninjau ulang pelaksanaan CG yang telah dilakukannya dan membandingkan pelaksanaannya terhadap perusahaan-perusahaan lain pada sektor yang sama. Hasil tinjauan dan perbandingan ini akan memberikan manfaat berikut kepada perusahaan:

* Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama survey CGPI berlangsung.
* Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi GCG dan pengelolaan perusahaan kearah pertumbuhan yang berkelanjutan.
* Peningkatan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dalam penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan.
* CGPI dapat dijadikan indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.
* Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

Proses Pemeringkatan Penerapan GCG Dalam CGPI

Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan GCG adalah sebagai berikut:

1. *Self-assessment*

Pada tahap ini perusahaan diminta mengisi kuesioner *Self-assessment* seputar penerapan CG di perusahaannya.

1. Pengumpulan Dokumen Perusahaan

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan GCG di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika ada perubahan, maka revisi harus dilampirkan).

1. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG selama tahun yang bersangkutan dalam bentuk makalah dengan memperhatika sistematik penyusunan yang telah ditentukan.

1. Observasi ke Perusahaan

Pada tahap ini tim peneliti CGPI akan berkunjung ke lokasi perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG.

Faktor-faktor Penilaian CGPI

(Menggunakan tema CGPI 2010: “Corporate Governance Perception Index 2010 Dalam Perspektif Etika”)

1. Komitmen

Aspek ini menunjukan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai unsur yang terkait dengan visi, misi, tata nilai, moral, etika bisnis, etika kerja, etika profesional, dan prinsip-prinsip GCG, dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi membangun inisiatif untuk membuat berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi etika yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
2. Kesungguhan Dewan Komsaris dan Direksi melibatkan diri dalam proses perumusan berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi etika yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
3. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melibatkan diri dalam pemastian semua dokumen tekah diimplementasikan selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
4. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melakukan kontemplasi dan refleksi atas kiprah bisnis yang beretika dan bermartabat serta melakukan resolusi.
5. Transparansi

Aspek ini menunjukan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasian berbagai regulasi, visi, misi, dan tata nilai perusahaan dalam menyampaikan informasi material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu dalam rangka pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, yang selaras dengan upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawaab secara berkeadilan.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif strategis dan kebijakan transparansi perusahaan yang mengitegrasikan berbagai regulasi, visi, misi, dan tata nilai perusahaan dalam menyampaikan informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu dalam rangka pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, yang selaras dengan upaya membangun bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.
2. Kesungguhan Direksi dan pimpinan perusahaan menyelaraskan strategi dan kebijakan transparasi perusahaan ke dalam berbagai panduan operasional peusahaan di seluruh unit bisnis dan fungsional guna menyampaikan informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, selaras dengan upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.
3. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan, pengukuran, dan evaluasi serta penyempurnaan hasil pencapaian penyelarasan strategi dan kebijakan transparansi perusahaan ke dalam berbagai panduan operasional perusahaan untuk seluruh unit bisnis dan fungsional dalam berbagai panduan operasional perusahaan untuk seluruh unit bisnis dan fungsional dalam menyampaikan informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu dalam rangka pengungkuapan informasi kepada para pemangku kepentingan, selaras dengan upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.
4. Kesungguhan seluruh anggota perusahaan untuk berpartisipasi menjalankan kebijakan transparansi perusahaan yang selaras dengan upaya membangun bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.
5. Akuntabilitas

Aspek ini menunjukan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai kejelasan tugas pokok, fungsi, kewenanganm, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan efektif dalam rangka pengendalian sistem internal Perusahaan dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengintegrasikan berbagai kejelasan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang harus dilaksanakan secara transparan, wajar dan berkesinambungan sebagai upaya mewujudkan tujuan perusahaan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis.
2. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan untuk mengintegrasikan pertanggungjawaban seluruh pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peran semua organ dan anggota perusahaan sebagai upaya mewujudkan tujuan perusahaan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis.
3. Kesungguhan organ perusahaan melakukan pengukuran atas inisiatif integrasi dan penyelarasan kebijakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh pencapaian kinerja perusahaan sebagai upaya mewujudkan tujuan perusahaan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis.
4. Kesungguhan anggota perusahaan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan dengan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan kepatuhan pada semua jenis peraturan lainnya dalam rangka meningkatkan citra dan martabat perusahaan.
5. Responsibilitas

Aspek ini menunjukan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan kesesuaian pelaksanakan dan pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkesinambungan, dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk berinisiatif mengintegrasikan kesexuaian pelaksanaan dan pneglelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perushaan, serta memastikan telah melakukan praktik terbaik pada setiap proses bisnis dalam rangka mewujudkan *good corporate citizenship.*
2. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam merumuskan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan perundang-undanganan dan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan pada setiap proses bisnis secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai, dan prinsip etika bisnis yang disepakati.
3. Kesungguhan organ perusahaan melakukan pengukuran atas berbagai kebijakan, sistem dan prosedur yang menjamin telah sesuainya pelaksanaan dan pengelolaan perushaan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis yang disepakati.
4. Kesungguhan anggota perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang kondusif guna mewujudkan tujuan perusahaan berdasarkan penegakan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan visi, misi, tata nilai dan prinsip etika bisnis yang disepakati.
5. Independensi

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan pengelolaan perusahaan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan secara profesional, berlandaskan integritas dan mampu mengelola konflik kepentingan serta tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif strategis perushaan dalam rangka menciptakan profesionalisme dan integritas seluruh organ dan anggota perusahaan guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usahanya.
2. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan kebijakan perusahaan, pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka mencipatakan profesionalisme dan integritas seluruh anggota organ dan perushaan guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usahanya.
3. Kesungguhan Direksi melaksanakan dan melakukan pemantauan serta evaluasi perbaikan atas pelaksanaan inisiatif strategis, kebijakan perusahaan, dan pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka menciptakan profesionalisme dan integritas selruh anggota organ dan perusahaan guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usaha.
4. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi dalam memunculkan sikap profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tujuan perusahaan dan kesinambungan usahanya.
5. Keadilan

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan pola perilaku organ dan anggota perusahaan serta perlakuan terhadap seluruh pemangku kepentingan selalu mengutamakan perlakuan yang setara dan wajar dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif strategis perusahaan dalam rangka mewujudkan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan kebijakan perusahaan, pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka mewujudkan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan dan melakukan pemantauan seerta evaluasi perbaikan atas pelaksanaan inisiatif strategis, kebijakan perusahaan, pedoman perilaku bisnis dan fungsional dalam rangka mencipatkan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan kepada seluruh pemangku kepentingan.
4. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipiasi dalam mewujudkan perlakuan yang setara, wajar, dan berkeadilan sesuai kebijakan persahaan kepada seluruh para pemangku kepentingan.
5. Kompetensi

Aspek ini menunjukan Dewan Komisaris dan Direksi untuk berkomitmen pada perilaku yang profesional, memiliki pengetahuan tentang kode etik dan hukum yang relevan, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek etika ketika dihadapkan dengan situasi yang menantang, mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan tata nilai serta mempromosikan praktik dan perilaku bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berkomitmen pada perilakuan yang profesional, memiliki pengetahuan tentang kode etik dan hukum yang relevan, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek etika ketika dihadapkan dengan situasi yang menantang, mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan etika pelayanan publik dan nilai-nilai yang berlaku, serta mempromosikan praktik dan perilaku yang beretika di lembaga publik dan organisasi perusahaan, dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.
2. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan menyelaraskan kebijakan pengembangan kompetensi etikal dari sumber daya manusia perushaan dengan tugas pokok dan fungsinya, dan memastikan sistem rewards dan punishment terlaksana berdasarkan penilaian kesesuaikan dengan kamus kompetensi.
3. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengukuran atas inisatif integrasi dan penyelarasan kebijakan kompetensi etikal dengan mekanisme evaluasi kompetensi yang mendukung tujuan perusahaan dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.
4. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi secara aktif menjalankan kebijakan SDM yang etikal dan mempromosikan praktik dan perilaku bisnis yang beretika.
5. Kepemimpinan

Aspek ini menunjukan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengintegrasikan, mendorong, dan menciptakan pola perilaku anggota perusahaan yang efektif, efisien dan berorientasi pada tata nilai, moral, etika, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mewujudkna bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam berinisiatif melakukan adaptasi dan integrasi corak kepemimpinan yang dimilikinya dalam rangka mentranformasikan organisasi perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang beretika dalam berhubungan dan berinteraksi engan kepentingan seluruh para pemangku kepentingan perusahaan, serta selalu mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dan berbagai unsur yang terkait dengan tata nilai, moral, dan etika.
2. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam menyelaraskan kebijakan pengembangan corak kepemimpinan yang dimilikinya dan selalu mendorong seluruh angota perusahaan dengan corak kepemimpinan tersebut untuk bertindak mewujdkan perusahaan yang beretika, serta mengintegasikan prinsip-prinsip GCG dan berbagai unsur yang terkait dengan tata nilai, moral, dan etika, dalam berhuungan dan berinteraksi dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan.
3. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil pencapaian corak kepemimpinan yang dimiliki dalam rangka mentransformasikan organisasi perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang beretika dalam berhubunan dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan.
4. Kesungguhan seluruh anggota perusahaan berpartisipasi dalam memunculkan corak kepemimpinan yang diperukan guna mewujukan erusahaan yang beretika, selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan berbagai unsur yang terkait dengan tata nilai, moral dan etika serta strategi dalam berhubungan dan berinteraksi dengan kepentingan seluruh para pemangku kepentingan perusahaan.
5. Kemampuan Bekerjasama

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam bekerja sama menanggapi isu-isu yang dihadapi perusahaan dan mengurangi resiko di setiap tingkatan untuk mendapatkan solusi terbaik dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan berinisiatif membangun kerjasama antar organ perusahaan guna mengurangi resiko pada setiap tingkatan dan memastikan praktik teraik serta membangun kerjasama dalam memecahkan sejumlah masalah dan isu-isu yang sedang dihadapi perusahaan.
2. Kesungguhan Direksi perusahaan berinisiatif membangun kerjasama lintas fungsional dalam mengurangi resiko pada tingkatan dan memastikan praktik terbaik serta membangun kerjasama dalam memecahkan sejumlah masalah dan isu-isu yang sedang dihadapi perusahaan pemangku kepentingan.

1. Kesungguhan organ perusahaan melakukan pengukuran atas terbentuknya iklim kerjasama yang beretika di dalam perusahaan guna mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.
2. Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi dalam menciptakan iklim kerja sama yang beretika guna mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip etika bisnis.
3. Visi, Misi dan Tata Nilai

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji kembali visi, misi, tata nilai, agar senantiasa sesuai dengan tuntutan bisnis dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab secara berkeadilan.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji ulang visi, misi, tata nilai, sesuai dengan tuntutan bisnis dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.
2. Kesungguhan Direksi dan Pimpinan perusahaan menyelaraskan visi, misi, dan tata nilai perusahaan dengan pelaksanaan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan ke dalam seluruh unit bisnis dan fungsional perusahaan.
3. Kesungguhan Dewan Komisaris, Direksi dan pimpinan perusahaan melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil penyelarasan visi, misi, dan nilai perusahaan dengan pelaksanaan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.
4. Kesungguhan anggota perusahaan untuk memahami dan melaksanakan visi, misi, tata nilai, sesuai dengan tuntutan bisnis dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.
5. Strategi dan Kebijakan

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan serta mengevaluasi berbagai analisis eksternal dan internal selaras dengan tata nilai prinsip-prinsip bisnis yang etikal dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berinisiatif melakukan adaptasi dan integrasi data, informasi, sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menetapkan strategi dan kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi, tata nilai, dan tujuan perusahaan serta mewujudkan perusahaan yang beretika.
2. Kesungguhan manajemen puncak perusahaan dalam menyelaraskan strategi dan kebijakan perushaan dengan fungsi dan program kerja perushaan dalam rangka mencapai visi, misi, tata nilai dan tujuan perusahaan, serta mewujudkan perusahaan yang beretika.
3. Kesungguhan Dewan Komisaris dan manajemen puncak perushaan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil pencapaian pelaksanaan strategi dan kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi, tata nilai, tujuan perusahaan, serta mewujudkan perusahaan yang beretika.
4. Kesungguhan seluruh anggota perusahaan berpartisipasi untuk memahami dan menjalankan strategi dan kebijakan erusahaan daam rangka mencapai visi, misi, tata nila, tujuan perusahaan serta mewujudkan perusahaan yang beretika dalam berhubungan dan berinteraksi dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan.
5. Etika

Aspek ini mewujudkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun dan mengintegrasikan bergai inisiatif dala mermuskan, menerapkan serta mengevaluasi berbagai tata nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merancang inisiatif pembuatan kebijakan konsep etika dalam perusahaan yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
2. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan berbagai kebijakan konsep etika dalam perusahaan yang selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
3. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi memastikan semua kebijakan konsep etika dalam perusahaan yang telah diimplementasikan selaras dengan penyelenggaraan bisnis yang sehat dan bermartabat.
4. Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan bisnis yang sehat dan bermartabat serta melakukan inisiatif penyempurnaan dokumen.
5. Iklim Etikal

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam menciptakan suasana kondusif agar para anggota perusahaan bertindak jujur, menepati janji, mengunjung tinggi tata nilai dan norma yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

1. Kesungguhan para pemangku kepentingan berpartisipasi dan berkontribusi untuk mengunjung tinggi norma dan standar yang berlaku dan disepakati dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.
2. Kesungguhan para pemangku kepentingan memiliki keleluasaan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.
3. Kesungguhan para pemangku kepentingan dalam membangun dan membina hubungan kerja antar mitra berlangsung secara profesional dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.
4. Kesungguhan para pemangku kepentingan memunculkan kinerja yang dicapai secara etikal dalam upaya mewujudkan bisnis yang sehat dan bermartabat.

Mengukur CGPI :

Pengukuran CGPI dapat menggunakan formula berikut ini:

CGPI Index = x 100%

Kategorisasi Pemeringkatan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CATEGORY** | **RATING** | **SCORE** |
| **A** | **HIGHLY RELIABLE** | **85,00 – 100,00** |
| **B** | **TRUSTWORTHY** | **70,00 – 84,99** |
| **C** | **FAIRLY RELIABLE** | **55,00 – 69,99** |

**Tema Pelaksanaan CGPI dari tahun ke tahun:**



**Perusahaan Sangat Terpercaya Menurut CGPI :**



1. **Firm Performance (Tobin’s Q)**

The Indonesian Institute of Corporate Governance telah melakukan penelitian akan adanya hubungan positif antara penerapan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan metode pengukuran Tobin’s Q :

Tobin’s Q = (QTOBIN) = (EMV + D) / (EBV + D)

Dimana:

Tobin’s Q : Firm Perfomance

EMV : Equity Market Value (harga penutupan saham di akhir tahun buku)

D : Debt: (utang lancar – aktiva lancar) + nilai buku sediaan + utang jangka panjang

EBV : Equity Book Value: total asset – total kewajiban

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan *corporate governance* yang diterapkan di perusahaan dengan kinerja perusahan yang bersangkutan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal pengukuran variabel *corporate governance* yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia (menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance, 2002).

Hasil analisis menujukkan bahwa untuk model regresi dengan *return on equity* sebagai variabel dependennya, hanya variabel *corporate governance* yang secara signifikan mempengaruhi *return on equity*. Sedangkan tidak ada satupun variabel control yang secara statistik signifikan mempengaruhi *return on equity*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi perusahaan.

1. **Rasio Keuangan**

Laporan keuangan yang bermutu merupakan sarana dasar untuk mengungkapkan kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan merupakan sarana utama berupa informasi keuangan yang dikomunikasikan kepada pihak luar. Dalam menilai kinerja perusahaan, investor harus senantiasa berusaha untuk dapat menganalisis kemampuan keuangan perusahaan, sehingga investor dapat memanfaatkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan ekonomi investor. Bagi sebagian besar investor institusional dan kreditur, laporan keuangan yang diungkapkan secara transparan dan akurat menjadi salah satu bahan masukan yang penting untuk memutuskan apakah mereka akan menginvestasi atau meminjamkan dananya kepada perusahaan tertentu.

Oleh karena laporan keuangan tidak dapat menyajikan gambaran kondisi non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan investor dan kreditur, maka banyak regulator pasar modal dan perbankan di Asia mewajibkan perusahaan menyajikan informasi non-keuangan perusahaannya, yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dengan demikian, dapat diharapkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat membantu investor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, perusahaan dapat menggunakan suatu teknik analisis rasio yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu menganalisis laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai metode yang sama yaitu untuk membuat agar data lebih mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuat keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam menganalisis kinerja keuangan dapat menggunakan analisis Return on Investment (ROI) dimana dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti yang penting sebagai salah satu teknik analisis yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Pengertian Return on Investment (ROI) menurut Munawir (2002; 89) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan kesuluruhan dana yang ditanamakan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dan untuk menghasilkan keuntungan. Return on Investment (ROI) merupakan terminologi yang luas dari rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan antara laba yang diperoleh dan investasi yang digunakan unuk menghasilkan laba tersebut.

Sesuai dengan investasi mana yang digunakan, rasio ini dibagi menjadi dua, yaitu Return on Total Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE), adapun pengertiannya untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Return on Total Asset (ROA)

Adalah suatu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh Aktiva atau dana yang dimiliki.

b.                  Return on Equity (ROE)

Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri.

Pada dasarnya, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu kepentingan pokok pemegang saham (shareholders) adalah bahwa perusahaan harus memupuk keuntungan (profit motive), sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan melakukan interaksi secara kelembagaan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Dalam interaksi tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang mungkin dan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan pokok pemegang saham, termasuk diantaranya kepentingan yang dimiliki karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, pesaing, pemerintah serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Mereka adalah stakeholders yang mempunyai kepentingan dalam kemakmuran perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengupayakan keseimbangan dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan shareholders saja tetapi juga bagi stakeholders untuk mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, prinsip-prinsip Good Corporate Governance mengatur hal-hal yang terkait dengan :

1. Transparansi (Transparency)

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja perusahaan, prinsip ini mengatur bagaimana pihak manajemen dapat memanajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko dapat dikelola pada waktu yang dapat ditolerir yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri. Selain itu, dalam prinsip ini mengatur pengembangan teknologi mformasi, memastikan penilaian kinerja yang terbaik, serta proses pengambilan keputusan yang efektif oleh pihak komisaris dan manajemen dimana keputusan ini dapat terkait dengan kinerja perusahaan yang mengarahkan pada kinerja yang semakin baik. Inti dari prinsip ini adalah meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu serta benar.

b.      Kemandirian (Independency)

Hubungannya dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, yaitu prinsip ini mengatur tentang bagaimana perusahaan harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan bebas dari tekanan atau pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam pengelolaannya perusahaan lebih meyakini dan lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih mengetahui keputusan yang terbaik yang harus diambil perusahaan, sehingga kinerjanya akan lebih terpercaya, akurat, dan menghindari proses penilaian kelayakan yang tidak fair dan juga akan menghindarkan masalah finansial.

c.       Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini mengatur bagaimana sebaiknya perusahaan membentuk komite audit untuk memperkuat fungsi pengawasan intern oleh komisaris. Peran audit intern ini dapat membantu dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Para auditor intern ini akan memberikan masukan kepada pihak manajemen atas kesalahan dan kekurangan yang akan datang dalam mengelola perusahaan pada periode yang lalu agar dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. Dalam prinsip ini, pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agency problem antara direksi dan audit. Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Praktik audit yang sehat dan independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan, antara lain dengan mengefektifikan komite audit.

d.      Pertanggungjawaban (Responsibility)

Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholders yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholder (keseimbangan eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai good corporate citizen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan akan menjadi profesional dan penuh etika, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang responsibel mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha.

e.       Kewajaran (Fairness)

Prinsip ini mengatur bagaimana menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris dan manajemen dalam mengelola masing-masing pusat pertanggungjawabannya. Fairness meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari kecurangan, seperti praktik insider yang merugikan atau dari keputusan direksi atau pemegang saham mayoritas yang merugikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan, sehingga kinerja perusahaan akan lebih stabil karena para pemegang saham mengetahui secara detail seluruh informasi perusahaan, baik mengenai RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, struktur modal perusahaan, kebijakan dividen perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengevaluasi kinerjanya, sehingga dengan demikian para investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya dan dapat mengambil sikap yang diperlukan.

Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Dengan adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat membantu investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan, maka pihak-pihak yang terkait di dalam perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih accountable (karena adanya sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan), lebih transparan, serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. Dalam hal ini, kinerja perusahaan akan meningkat, sehingga prinsip corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan.

Pengungkapan laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency*, dimana sebuah entitas harus mengedepankan transparansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. *Good Corporate Governance* secara implisit mengisyaratkan adanya transparansi terkait informasi keuangan yang reliabel dan relevan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk menyediakan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai informasi tentang laba yang diperoleh.

Semakin transparan dan semakin jelas terlihat keadaan perusahaan, maka tindak penyelewengan dapat ditekan bahkan ditiadakan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Pengungkapan laporan keuangan yang mumpuni atau mencukupi akan diberi 1 poin.

Pengungkapan laporan keuangan yang hampir baik akan mendapat 2 poin

Pengungkapan laporan keuangan yang baik atau menyeluruh akan mendapat 3 poin.

1. **Model Perbankan**

Dalam pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia dinyatakan, untuk terciptanya kondisi yang mendukung implementasi Good Corporate Governance yang efektif, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya Good Corporate Governance secara efektif.

Selain itu pemerintah dan otoritas terkait harus mampu menjamin dan membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara serius. Disisi lain, sebagai subjek Good Corporate Governance bank perlu menerapkan standar akuntansi dan standar unit yang sama dengan standar yang berlaku umum serta melibatkan auditor eksternal dalam proses audit. Tujuannya supaya diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran ditempat lain.

Dengan demikian, stakeholder dapat berharap akan interpretasi yang sma atas fenomena – fenomena yang sejenis. Sebab pada dasarnya persoalan Good Corporate Governance adalah persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder.

Pada bidang perbankan, misalnya antara lain adalah peraturan Bank Indonesia nomor 2/27/PBI/2000 tentang bank umum. Dalam peraturan ini diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota direksi dan komisaris bank umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan pengurus bank. Melalui penerapan peraturan itu diharapkan dapat dieliminasi penyimpangan – penyimpangan. Operasi bank yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris, maupun yang bukan interest perseroan (Bank).

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan perundangan-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka diberlakukan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 juncto nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Umum.

Menurut Standar Profesioanl Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan Yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:

* Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
* Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI.
* Jika terdapat kondisi dan peristiwa semuala menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setalah mempertimbangkan rencana manajemen tersebut dapa secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
* Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
* Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
* Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan atau tidak direview.
* Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya jauh menyimpang dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dnegan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dnegan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
* Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

1. Pendapat Wajar Dengan Penegcualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila:

* ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
* Auditor yakin, atas dasr auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang wajar.
* Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraph terpisah yang dicantumkan sebelum paragraph pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam satu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat, oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan satu mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

1. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

* Auditor tidak menyatakan pendapat bila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substansif yang mendukung pernyataan tersebut.
* Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.

Jika opini audit menyatakan bahwa suatu perusahaan *going concern*, maka nilai perusahaan bertambah 1. Namun jika opini audit menyatakan perusahaan tersebut tidak *going concern,* maka nilainya 0.

Beberapa studi memenukan bahwa seorang auditor lebih sering menyatakan suatu perusahaan *going concern* apabila pada tahun sebelumnya perusahaan tersebut juga dinyatakan *going concern.*

*Going concern* sendiri adalah pernyataan bahwa perusahaan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan likuidasi jangka waktu dekat.

1. **Earning Management**

**(Modified Jones Model Dechow, et. al 1995)**

Scott dalam Sanjaya menjelaskan ada empat pola praktik peneglolaan laba, yaitu:

1. Taking a bath

Hal ini dapat terjadi selama periode stress atau reorganisasi termasuk penempatan seorang CEO baru. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, maka manajemen merasa lebih baik atau sekaligus melaporkan kerugian yang lebih besar.

1. Minimalisasi laba

Pola ini hamper sama dengan *taking a bath* tetapi kurang ekstrim. Pola ini dipilih untuk menghindari pengawasan perusahaan secara politik.

1. Maksimalisasi laba

Manajer menggunakan cara memaksimalisasi laba bersih untuk tujuan bonus. Perusahaan yang hamper melanggar perjanjian utang mungkin melakukan maksimalisasi laba.

1. Perataan laba

Manajer mempunyai cara untuk meratakan laba yang disisakan untuk *bogey* dan *cup*. Sebaliknya, earnings mungkin secara permanen atau temporer tidak cukup untuk tujuan bonus. Lebih lanjut, jika manajer adalah *risk-averse*, mereka akan memilih pengurangan variabel aliran bonus. Manajer melakukan pemerataan laba karena tindakan ini dapat mengurangi kemungkinan untuk diganti.

Manajer melakukan pengelolaan laba dengan melalui pemilihan metode akuntansi yang diizinkan, yaitu dengan melakukan manipulasi pendapatan dan biaya serta aktivitas perusahaan yang tidak normal dilakukan. Sebagian besar, pengelolaan laba bersifat legal dan tidak melanggar standar akuntansi yang telah ditetapkan. Tekanan persaingan untuk menghasilkan laba yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya perilaku yang tidak etis. Hal ini dialami oleh beberapa perusahaan terutama perusahaan yang menilai perusahaan dari kinerja akuntansi dan laba yang diperoleh.

1. **Earning Management Jones Model, modified by Dechow:**
2. Menghitung *total accruals*

TAC = Nit – CFOit ……………………... (1)

Where:

TAC : Total akrual

Nit : laba nersih

CFOit : cash flow dari operasi perusahaan

1. Peregresian dengan menentukan β1, β2, dan β3

TAit/Ait-1 = β1 (1/Ait-1) + β2 (∆Revt/Ait-1) + β3 (PPEt/Ait-1) + e…….… (2)

Where:

Ait-1 : total asset pada periode t-1

∆Revt : perubahan pendapatan dalam periode t

PPEt : property, plant, and equipment periode t

β1, β2, β3 : koefisien regresi

1. Memasukkan koefisien regresi (β1, β2, β3) ke rumus *non-discretionary accruals*

NDAit = β1 (1/Ait-1) + β2 (∆Revt/Ait-1 - ∆Rect/Ait-1) + β3 (PPEt/Ait-1) …………….…. (3)

Where:

∆Rect : perubahan piutang bersih dalam periode t

NDA : Non-discretionary accruals

1. Menghitung *non-descretionary accruals*

DAit = TAit / Ait – NDAit ………….…… (4)

Where:

DAit : discretionary accruals pada periode t

Ujiyantho dan Pramuka meneliti tentang mekanisme *corporate governance*, manajemen laba, dan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini variabel *corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris. Kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh posiitf terhadap pengelolaan laba, dan variabel tersebut secara bersama-sama teruji dengan tingak pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan laba. Sedangkan pengelolaan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi data mengenai ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengelolaan laba menghasilkan kesimpulan:

* Ukuran perusaahn mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan laba. Perusahaan yang besar cenderung menggunakan prosedur akuntansi menurunkan laba untuk mengurangi pembebanan pajak yang tinggi dan *political cost*, akibatnya laba yang dilaporkan mengandung akrual tinggi dan berkualitas rendah.
* Kualitas audit mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan, artinya KAP Big 4 tidak mempengaruhi pengelolaan laba, akan tetapi tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Hal ini dimungkinkan KAP bukan merupakan proksi kualitas laba yang tepat di Indonesia.
* Proporsi dewan komisaris independen sebagai salah satu proksi *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengelolaan laba. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa dewan komisaris dari luar tidak dapat mengurangi praktik pengelolaan laba oleh manajemen. Hal ini dimungkinkan kinerja yang dilakukan oleh komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham belum maksimal.
* Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengelolaan laba, artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi pengelolaan yang terjadi di perusahaan.

1. **Firm Value**

Nilai suatu perusahaan dapat ditentukan dengan membandingkan harga per saham dengan laba per saham. Perhitungannya menggunakan rumus *Price Earnings Ratio* atau rasio harga terhadap laba. PE Ratio sendiri adalah ukuran hubungan antara harga pasar saham perusahaan dan profitabilitasnya.

**PE Ratio =**

Dan untuk mengetahui berapa jumlah *earning per share* digunakan rumus berikut:

**Earning per Share =**

Revisi kepercayaan adalah proses mengubah keyakinan untuk memperhitungkan informasi baru. Yang logis formalisasi revisi keyakinan yang diteliti dalam filsafat dalam database, dan kecerdasan buatan untuk desain agen rasional.yakni informasi baru tentang situasi saat ini, sedangkan keyakinan lama mengacu pada masa lalu, update pengoprasian mengubah keyakinan lama untuk memperhitungkan perubahan, sedangkan revisi yakni kedua keyakinan lama dan informasi baru mengacu pada situasi yang sama, sebuah inkonsistensi antara informasi baru dan lama dijelaskan oleh kemungkinan informasi lama yang kurang dapat diandalkan dibandingkan yang baru, revisi adalah proses memasukkan informasi baru kedalam set dari keyakinan selama tanpa menghasilkan inkonsistensi.

Asumsi utama revisi keyakinan adalah bahwa perubahan minimal; pengetahan sebelum dan sesudah perubahan harus semirip mungkin. Dalam kasus pembaharuan, prinsip in meresmikan asumsi inersia sedangkan dalam kasus revisi, memberlakukan informasi sebanyak mungkin untuk dipertahankan oleh perubahan itu.

Dua jenis perubahan biasanya dibedakan menjadi memperbaharui dan revisi. Memperbaharui Belief Revision adalah suatu studi yang dilakukan untuk memberikan jawaban saat serangkaian informasi dapat mengubah keyakinan investor dalam membuat keputusan.

Kombinasi antara informasi positif dan informasi ngeatif dengan serangkaian kemungkinan dan tipe informasi disebut dengan information mixed (informasi campur), sehingga akan bernilai 1 jika informasi negatif berubah menjadi informasi positif, bernilai 0 jika informasi positif berubah ke informasi negatif, bernilai 1 jika informasi positif berubah menjadi informasi positif, dan 0 apabila informasi negatif tetap menjadi informasi negatif.